

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu upaya atau kebijakan yang dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat, adanya pemerataan pendapatan, terciptanya suatu lapangan kerja, berkembangnya suatu teknologi yang akan merubah suatu kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta nantinya secara otomatis akan dapat meningkatkan suatu hubungan ekonomi regional².

Pembangunan juga merupakan suatu bentuk perubahan yang positif, dimana didalamnya mencakup suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang terdapat di suatu daerah. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk serta pendapatannya. Ada tiga nilai pokok dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu³.

1. Dapat berkembangnya kemampuan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).
2. Rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia yang terus meningkat.

²Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*, (Jakarta : KENCANA, 2006) hal 3

³Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016) hal 11

3. Meningkatnya kemauan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) sesuatu yang merupakan haknya.

2. Pembangunan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana masyarakat bersama pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya secara efektif dan efisien serta membentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan swasta guna menciptakan suatu lapangan kerja yang nantinya diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut secara merata⁴. Tolak ukur berhasil tidaknya suatu pembangunan dapat dilihat dari berbagai macam cara salah satunya yaitu dengan pendekatan ekonomi yang didasarkan dari aspek pendapatan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu bentuk keberhasilan dari suatu pembangunan di dalam suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan ekonomi daerah tersebut. Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya suatu faktor-faktor produksi, yaitu: (1) investasi, dengan adanya investasi pastinya akan menambah jumlah barang modal; (2) penduduk, dimana akibat dari suatu perkembangan penduduk pastinya akan menambah jumlah tenaga

⁴Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016) hal 374

kerja; (3) adanya teknologi yang semakin berkembang; dan (4) pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan⁵.

4. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu bentuk dari pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu dengan adanya kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi⁶. Di dalam pertumbuhan ekonomi wilayah terdapat suatu teori pertumbuhan wilayah yaitu menganalisis bagaimana pertumbuhan terjadi dalam suatu lingkungan spasial yang menggunakan wilayah sebagai kategori dasar. Dimana suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor produksi dan pertukaran komoditas.

5. Pendapatan Regional

Hasil pembangunan ekonomi yang dicapai dapat memberikan informasi serta memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi maupun perencanaan pembangunan. Penyajian angka-angka pendapatan regional merupakan alat untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan tersebut khususnya dalam bidang ekonomi. Pendapatan regional adalah nilai produksi barang dan jasa yang ada dalam perekonomian di suatu wilayah selama satu tahun.

⁵Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*, (Jakarta : KENCANA, 2006) hal 9

⁶Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 46

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang timbul dari seluruh sektor perekonomian. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menjadi salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah yang ditampilkan secara berkala dan digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut. Sajian hasil perhitungan PDRB dibagi menjadi dua bentuk yaitu atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan tidak dipengaruhi oleh inflasi sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sangat dipengaruhi oleh inflasi atau fluktuasi harga yang ada. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menghitung pergeseran struktur ekonomi. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka semakin tinggi pula kekayaan daerah tersebut.

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:

1) Pertanian.

- 2) Pertambangan dan Penggalian.
 - 3) Industri Pengolahan.
 - 4) Listrik, Gas dan Air Bersih.
 - 5) Bangunan/Konstruksi.
 - 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
 - 7) Pengangkutan dan Komunikasi.
 - 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
 - 9) Jasa-jasa.
- b. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar
PDRN adalah hasil pengurangan PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud di sini adalah pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) yang terjadi akibat terpakainya barang modal tersebut dalam proses produksi.
- c. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor
Produk Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Produksi didapatkan dari pajak tidak langsung netto yang dikeluarkan dari PDRN atas Dasar Harga Pasar. Pajak tidak langsung meliputi pajak bea ekspor, penjualan, bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan⁷.

⁷Achmad Fauzi, Tesis: "*Analisis Spasial Dan Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Di Wilayah Kabupaten Cilacap*" (Purwokerto: UNSOED, 2005), Hal.19.

Perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu⁸:

a. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran adalah pendapatan regional yang ditentukan dengan menjumlahkan seluruh nilai guna akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah. Seluruh penyediaan barang dan jasa dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, perubahan stok dan ekspor netto (ekspor-impor), pembentukan modal tetap bruto (investasi).

b. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendapatan regional didasarkan atas pendekatan produksi yang dilakukan dengan cara nilai produksi yang tercipta oleh tiap-tiap sektor produksi dalam perekonomian dijumlahkan seluruhnya. Oleh karena itu, untuk menghitung pendapatan regional yang didasarkan oleh pendekatan produksi, yang harus dilakukan pertama adalah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor dijumlahkan.

c. Pendekatan Penerimaan (*Income Approach*)

Pendapatan regional dalam cara ini dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan faktor-faktor produksi dalam

⁸Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 24

memproduksi barang dan jasa. Dalam hal ini yang dijumlahkan adalah: upah dan gaji, penyusutan, surplus usaha, dan pajak tidak langsung netto.

6. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah atau regional merupakan unsur-unsur interaksi dengan entitas ekonomi yang beragam. Untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi suatu wilayah didasarkan melalui ekonomi regional, yaitu dengan cara mengevaluasi secara kolektif dan komparatif terhadap kesempatan dan kondisi ekonomi skala wilayah.

Perencanaan pembangunan wilayah dapat dianggap sebagai perencanaan perbaikan dalam penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dimasyarakat dalam suatu wilayah serta untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumberdaya-sumber daya dengan tanggung jawab. Selain itu dengan menciptakan suatu kebijakan pembangunan wilayah merupakan salah satu bentuk tindakan atau keputusan yang harus diambil oleh pemerintah atau pengambil keputusan publik yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan aspirasi dan keinginan yang ada di dalam masyarakat.

7. Teori Lokasi

Masalah lokasi dari setiap kegiatan pembangunan baik secara nasional maupun secara wilayah harus dipertimbangkan dan dipilih dengan tepat agar kegiatan suatu pembangunan dapat berlangsung secara produktif dan

efisien⁹. Landasan utama dari suatu lokasi yaitu terdapat ruang, karena lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan) berdasarkan bujur dan lintangnya. Namun dalam studi ruang, yang menjadi perhatian bukanlah sekedar kemampuan dalam menentukan posisi atau letak kegiatan pembangunan yang ada dalam satu ruang wilayah, melainkan bagaimana dampak atau keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan kegiatan yang ada pada lokasi lain dengan melihat jarak (dekat atau jauhnya) satu kegiatan dengan kegiatan lain. Teori Lokasi merupakan sebuah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi. Selain itu, Teori Lokasi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lokasi secara geografis, serta pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain¹⁰.

Analisis terkait bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya di mana orang masih ingin mendatangi pusat lokasi yang memiliki potensi tersebut, sehingga hal ini berkaitan dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Selain itu, berbagai faktor yang ikut dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, antara lain ketersediaan bahan baku, upah buruh, jaminan keamanan, fasilitas penunjang, daya serap pasar lokal, dan aksesibilitas dari tempat produksi ke wilayah pemasaran yang

⁹H. RahardjoAdisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2005) hal 39

¹⁰Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 122

dituju (terutama aksesibilitas pemasaran keluar negeri), stabilitas politik suatu negara, dan kebijakan daerah (peraturan daerah).

8. Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Cristaller seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman pada tahun 1933 yang kemudian diperluas oleh August Losch seorang ahli ekonomi pada tahun 1944. Teori-teori tersebut telah merintis analisis tata ruang yang menekankan pada identifikasi sistem wilayah baik secara fisik ataupun ekonomi yang memiliki pola distribusi kegiatan-kegiatan produksi dan daerah-daerah perkotaan secara hirarkis¹¹.

Dalam model Christaller menganalisis susunan spasial baik segi mikro yaitu menganalisis mengenai distribusi produksi barang-barang secara individual, dan segi makro menyangkut distribusi aglomerasi. Sedangkan dalam model Losch tidak menganalisis susunan spasial yang overall, tetapi lebih merupakan model-model lokasi spesialisasi spasial di mana tidak perlu semua barang di produksi pada pusat yang lebih unggul.

Teori tempat sentral menjelaskan polageografis dan struktur herarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah nodal. Menurut model Christaller, pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya melayani pusat-pusat yang lebih rendah ordenya. Sedangkan menurut Losch pusat-pusat yang lebih kecil melayani pusat yang lebih besar. Tetapi model-model tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, tetapi pembahasan masalah wilayah

¹¹H. RahardjoAdisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2005) hal 51

nodal terutama mengenai respons nodal yang menunjukkan ciri bahwa pertumbuhan kegiatan di suatu pusat adalah untuk melayani penduduk di daerah belakang (*hinterland*). Karena jika pertumbuhan terjadi di daerah belakang akan mendorong pertumbuhan di pusat perkotaan.

9. Teori Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan (*growth pole*) dipelopori oleh ahli ekonomi regional berkebangsaan Prancis, Francois Perroux, pada sekitar tahun 1955. Konsep *Growth Pole* menurut Perroux menjelaskan bahwa berdasarkan fakta dasar perkembangan peruangan (spasial), pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Sebaliknya, pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah. Pertumbuhan itu kemudian menyebar sepanjang saluran-saluran yang beranekaragam terhadap keseluruhan perekonomian.

Inti dari teori pusat pertumbuhan ini adalah dengan adanya satu daerah sentral yang menjadi pusat pertumbuhan dimana akan mendorong pertumbuhan bagi daerah sekitarnya. Dalam skala yang lebih besar, aktivitas pusat pertumbuhan ini akan dapat memacu kinerja perekonomian di suatu wilayah menjadi lebih baik. Ada empat sifat yang menjadi ciri dari pusat pertumbuhan ekonomi. Keempat sifat tersebut adalah sebagai berikut¹².

¹²Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 162-163

1. Adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Dengan demikian kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

2. Adanya efek pengganda (*multiplier effect*)

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Unsur efek pengganda memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan kota belakangnya. Hal ini terjadi karena peningkatan berbagai sektor di kota pusat pertumbuhan akan membutuhkan berbagai pasokan baik tenaga kerja maupun bahan baku dari kota belakangnya.

3. Adanya konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut.

4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya

Selama terdapat hubungan yang harmonis di antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan kota belakangnya maka pertumbuhan kota pusat akan mendorong pertumbuhan kota belakangnya.

10. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Didalam suatu daerah terdapat suatu rencana dalam struktur wilayah yang dimana merupakan suatu tatanan dalam kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bertujuan sebagai suatu arahan dalam pembangunan di suatu wilayah dengan cara memanfaatkan ruang wilayah yang berdaya guna, serasi, selaras serta seimbang dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan menetapkan suatu wilayah sebagai pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Dalam struktur ruang baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten salah satunya dikenal dengan istilah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

B. Perumusan Model Penelitian

1. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi tipologi daerah perekonomian masing-masing wilayah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan dapat mengidentifikasi posisi

suatu daerah perekonomian masing-masing wilayah kecamatan dengan memperhatikan perekonomian Kabupaten Cilacap sebagai daerah referensi.

2. Analisis *Location Quotient* dan analisis *Dynamic Location Quotient*

Setelah diberlakukannya suatu kebijakan otonomi daerah, dimana setiap daerah memiliki hak untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi bagidaerahnya. Untuk itu alat analisis yang digunakan untuk menentukan potensiperekonomian suatu wilayah adalah LQ (*Location Quotient*) dan DLQ (*Dynamic Location Quotient*).Dimana kedua teknik analisisini akan membandingkan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan suatu sektor secara nasional.

C. Penelitian terdahulu

Berikut ini merupakan beberapahasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang kemudian digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam kegiatan penelitian ini.

1. Penelitian tentang “Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes”. Variabel yang digunakan: Rata-rata PDRB antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Brebes, Jumlah Fasilitas Pelayanan antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Brebes, Jarak antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Brebes, Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes, Pendapatan Per Kapita Kabupaten Brebes. Hasil analisis Tipologi Klassen : Terdapat 3 Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes yang termasuk dalam daerah tertinggal yaitu Kecamatan Songgom,

Banjarharjo, dan Larangan, Hasil analisis Interaksi Spasial : Kekuatan interaksi keruangan Kecamatan Jatibarang dan Larangan mempunyai daya tarik bagi masyarakat di SWP Tengah dilihat dari masyarakat di kecamatan lain lebih memilih memanfaatkan fasilitas yang ada di kedua kecamatan tersebut, Hasil analisis Skalogram : Kecamatan dengan jumlah dan jenis fasilitas yang lengkap terdapat di Kecamatan Jatibarang dan Larangan¹³.

2. Penelitian tentang “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon Selatan”. Variabel yang digunakan: Jumlah Fasilitas Pelayanan antar Wilayah (Kelurahan) Kecamatan Harjamukti, Jarak antar Wilayah (Kelurahan) Kecamatan Harjamukti, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah tiap Kelurahan, Hasil analisis menunjukkan Kelurahan Kecapi berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, kesehatan karena kelengkapan fasilitasnya, sedangkan Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah karena merupakan ibu kota kecamatan, dan pusat pemukiman, dan daerah wisata rohani, Kelurahan harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan lahan kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan., Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan dan jasa, karena jaraknya yang sangat

¹³ Rahmat Andi Yulianto, Skripsi: “Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes” (Semarang: UNDIP, 2015), Hal.VII.

dekat dengan Kelurahan Kecapi, Kelurahan Argasanya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya berpotensi untuk lahan perkebunan dan peternakan¹⁴.

3. Penelitian tentang “Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi antar Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu”. Variabel yang digunakan : Jumlah Fasilitas Pelayanan antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Pringsewu, Jarak antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Pringsewu, Jumlah Penduduk antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Pringsewu, Hasil analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas diperoleh bahwa di Kabupaten Pringsewu terdapat satu pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Pringsewu, Hasil analisis Gravitasi menunjukkan bahwa pada kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan yakni kecamatan Pringsewu yang memiliki interaksi paling kuat adalah Kecamatan Gadingrejo¹⁵.
4. Penelitian tentang “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang”. Variabel yang digunakan: Kecamatan Dalam Angka tahun 2012 PDRB atas dasar harga konstan pada tiap kecamatan, PDRB Kabupaten Jombang atas dasar harga konstan tahun 2002 sampai dengan tahun 2011, Hasil analisis Skalogram : Kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas terbanyak dan menempati hirarki I adalah

¹⁴ Sasya Danastri, Skripsi: “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon Selatan” (Semarang: UNDIP, 2011), Hal.6.

¹⁵ Ade Pratama Poetra, Skripsi: “Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi antar Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi antar Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu” (Bandar Lampung: UNILA, 2016), Hal.2.

kecamatan Jombang, pada RTRW Kabupaten Jombang juga menyebutkan bahwa kecamatan Jombang sebagai kecamatan pusat pertumbuhan utama yang ada di Kabupaten Jombang, Kemudian berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) : Sektor unggulan Kabupaten Jombang yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran¹⁶.

5. Penelitian tentang “Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cilacap”. Variabel yang digunakan: data sekunder yaitu berupa data times series dengan periode waktu tahun 2008-2012 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Cilacap dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian, Metode analisis yang digunakan yaitu Tipologi Klassen, Analisis Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis Overlay, Analisis Skalogram, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dan kawasan kerjasamanya adalah Kawasan Barat dengan pusat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Majenang, Kawasan Tengah dengan pusat pertumbuhan Kecamatan Gandrungmangu, Kawasan Timur dengan pusat pertumbuhan Kecamatan Kesugihan, untuk pengembangannya perlu dengan meningkatkan investasi guna mengembangkan sektor

¹⁶ Azharia Lathiefunnisa, Skripsi: “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang” (Jember: UNEJ, 2013), Hal.VIII.

unggulan yang berdaya saing kompetitif dan komparatif, sehingga menopang Kecamatan Hiterlandnya untuk tumbuh dan berkembang¹⁷.

D. Kerangka berfikir

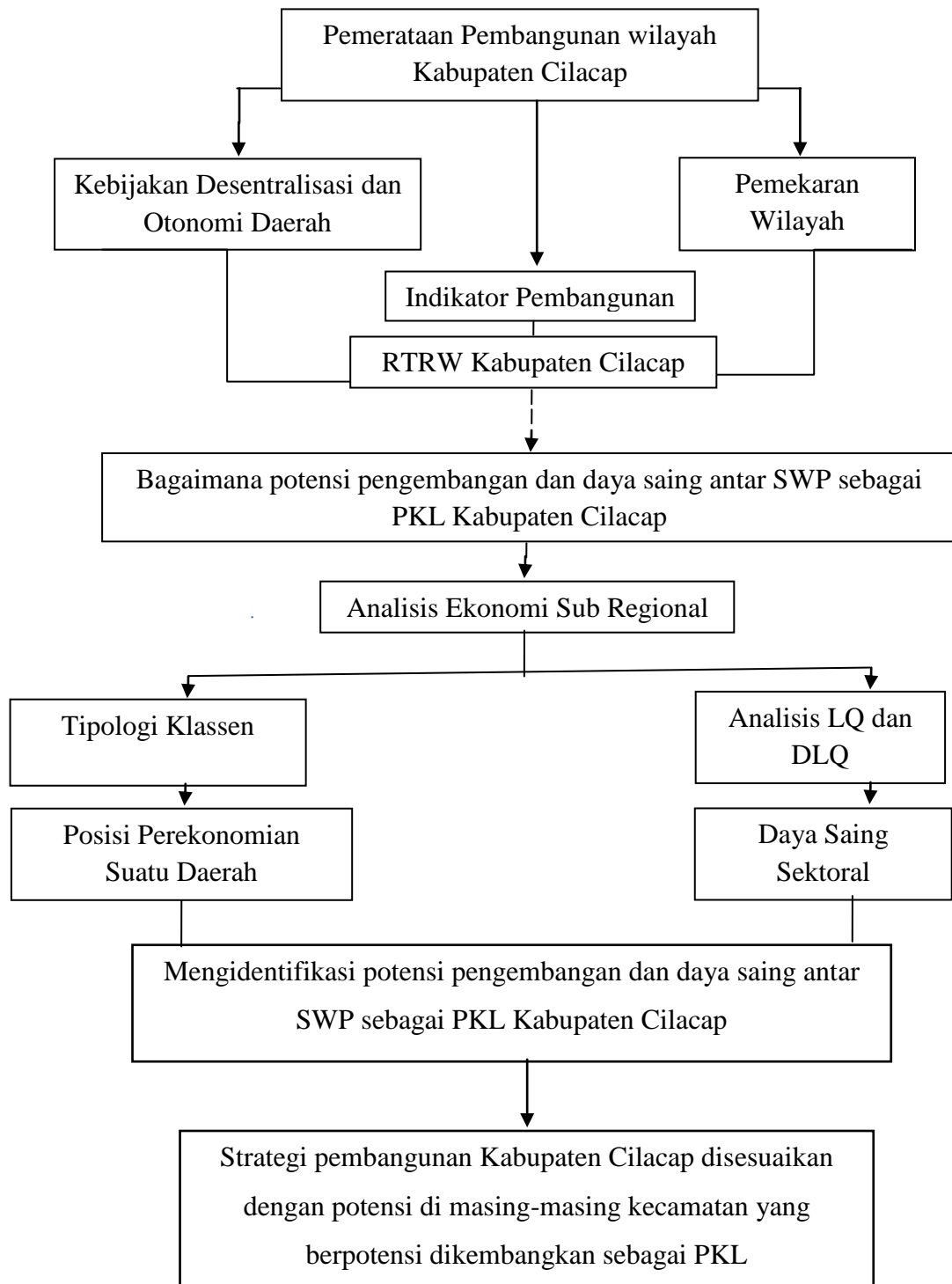
Di dalam suatu proses pembangunan ekonomi terdapat suatu perbedaan potensi ekonomi dan geografi wilayah, hal itulah yang menjadifaktor utama penyebab terjadinya ketimpangan daerah. Selain itu, adanya arus barang dan faktor produksi antar wilayah yang tidak lancar juga menjadi pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu menciptakan suatu kebijakan dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi daerah menjadi suatu hal yang sangat penting yang harus diambil oleh perencana pembangunan guna untuk mendorong proses pembangunan daerah.

Faktor-faktor penentu performa ekonomi suatu daerah tidak hanya mencakup kualitas kelembagaan, produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia saja tetapi juga mencakup faktor geografi. Dengan merumuskan suatu kebijakan tata ruang wilayah dalam menentukan suatu wilayah sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di dalam SWP Kabupaten Cilacap, maka salah satu langkah penting untuk dilakukan yaitu analisis terhadap pertumbuhan wilayahnya. Untuk memperoleh suatu gambaran detail mengenai perekonomian Kabupaten Cilacap dan mempertajam analisis maka dilakukan regionalisasi analisis ke dalam sub wilayah yang meliputi 24 kecamatan.

¹⁷ Aziz Pratomo, Jurnal: “*Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cilacap*” (Semarang: UNES, 2014), Hal.1.

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap pola pertumbuhan masing-masing wilayah dalam SWP Kabupaten Cilacap dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotien* (DLQ). Dari analisis ini akan diperoleh keadaan atau posisi perekonomian dan daya saing sektoral pada suatu daerah yaitu pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Sintesis dari seluruh analisis yang telah diuraikan akan bermuara pada satu perumusan alternatif langkah strategis dalam rencana sistem perkotaan dan upaya pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap melalui konsep penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) baru di tiap kecamatan atau dalam SWP Kabupaten Cilacap. Sehingga nantinya diharapkan akan mempersempit kesenjangan antar daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Secara grafik, alur berpikir dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir